

Aksi Damai Diam Hitam Kamisan di Depan Istana ke 42
JSKK (Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban)
Jl. Bonang 1 A Menteng Jakarta Pusat – 12870, telp 021 3913473

No. : 16/Surat Terbuka_JSJKK/XI/07

Hal : **Penuntasan kasus pelanggaran HAM (Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)**
Permohonan Audiensi korban pelanggaran HAM

Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Merdeka

Tiga hari lagi, tepatnya tanggal 25 November 2007 para pecinta kemanusiaan diingatkan untuk berhidmat menolak kekerasan terhadap perempuan. Beberapa tahun yang lalu, Pada tanggal 25 November 1981 di Bogota, Kolombi, para pecinta kemanusiaan telah mentekadkan bersama sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sebuah hari yang diinspirasi dari peristiwa pembunuhan keji terhadap aktivis perempuan dan buruh, kakak beradik Miraval oleh pemerintah diktator Trujillo di Republik Dominika pada tanggal 25 November 1960. peristiwa tersebut menjadai pijakan bagi gerakan perempuan sedunia untuk melakukan kampanye menolak kekerasan terhadap perempuan.

Bagi kami korban dan keluarga korban tragedi kemanusiaan 1965/1966, tragedi Tanjung Priok 1984, tragedi Talangsari 1989, Penculikan aktivis 1997/1998, tragedi Trisakti Semanggi I dan Semanggi II, Mei 1998, Pembunuhan Munir, Lapindo dll. Kekerasan terhadap perempuan nyata dan masih kerap terjadi dalam segala bentuknya baik dalam ranah domestik ataupun publik.

Ketika Bapak Presiden, tak juga mengambil langkah dan tindakan nyata dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa kami, maka pada itu pula Bapak Presiden memelihara kekerasan terhadap perempuan. Penembakan, penghilangan, penangkapan, penyiksaan, penahanan terhadap kami, anak kami, suami kami, saudara kami pada berbagai peristiwa pelanggaran HAM, menyisakan sekian kesedihan dan derita yang tak berujung bagi kami para korban perempuan, atau ibu dan isteri para korban.

Penolakan Negara ini untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi memberi tekanan mental dan psikologis yang besar bagi kami para korban yang selanjutnya berpengaruh buruk pada ruang sosial, ruang budaya dan ruang politik kami. Hal serupa pun masih banyak terjadi terhadap kaum perempuan lainnya, dalam berbagai macam bentuknya.

Melalui kamisan kami yang ke 42 kalinya, kami meminta Bapak Presiden untuk segera bertindak aktif menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi, dan segera bersedia menerima permohonan audiesi kami dengan Bapak Preside. Dan di hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, kami juga meminta Negara berperan aktif dalam hal "*peng-arus utamaan*" hak dan kepedulian terhadap perempuan dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil .

Terimakasih,

Jakarta, 22 November 2007

Hormat kami,

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

